

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
ERA COVID 19 DI DESA LATELLANG KECAMATAN
PATIMPENG KABUPATEN BONE



Oleh :

A.WAHDANIAH

Nomor Induk Mahasiswa : 105611129717

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ERA
COVID 19 DI DESA LATELLANG KECAMATAN PATIMPENG
KABUPATEN BONE**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Sudi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh :

A.WAHDANIAH

Nomor Stanbuk : 105611129717

Kepada

02/09/2021

1 exp.
smb. Alumni

R/0104/ADN/21CD
WAH
L'

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL

Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Era Covid 19 di Desa Latellang Kecamatan
Patimpeng Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : A. Wahdaniah

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1129 717


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si.



Dr. Muhammad Tahir, M.Si.

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua


Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

()


2. Dr. H. Muhammad Isa Ansyari, M.Si

()

3. Dr. Hafis Elfiansya Parawu, ST., M.Si

()

4. Andriana, S.IP., M.AP

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A. Wahdaniah

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1129 717

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 September 2021



A. Wahdaniah

ABSTRAK

A.WAHDANIAH. 2021 IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ERA COVID 19 Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone di bimbing oleh ibu Dr. Hj. Budi Setiawati M.Si, selaku pembimbing I dan bapak Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan PKH pada masyarakat Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam pengolahan data PKH secara komprehensif, di olah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai keluarga penerima PKH. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan adapun sumber data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dan sumber data lainnya secara sumber data sekunder. Teknologi pengolahan dan analisis data telah melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah yang pertama: PKH dilaksanakan di Desa Latellang, tetapi belum maksimal, yang menunjukkan bahwa 61 warga di Desa Patimpeng mendapat manfaat dari rencana tersebut, sedangkan data KMP Desa Latellang memiliki 390 kepala keluarga. Dari data tersebut, ada sekitar 15 penerima PKH yang tidak terdaftar sebagai warga miskin. Kedua: Faktor Pendukung: Masyarakat masih mudah berkumpul pada saat pertemuan awal dan pertemuan kelompok Penerima PKH sangat termotivasi dan antusias saat dana PKH dikeluarkan, dan mereka tetap bersikeras untuk melanjutkan bantuan positif dari koordinator, bahkan kalau tidak terlalu kuat, ada komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyukseskan PKH untuk membantu memutus mata rantai kemiskinan masyarakat yang menerima manfaat. Faktor penghambat: Data yang dikirimkan langsung dari pusat bersifat top-down bukan bottom-up, data mungkin berbeda dengan situasi di lapangan, dan nama peserta yang tidak berhak atas bantuan tidak dapat ditukar atau ditambahkan. Ketiga: Organisasi Desa Latellang ingin melakukan upaya penetapan data penerima dan peserta PKH bekerjasama dengan pemerintah terkait kedepannya agar lebih efisien dan sesuai dengan harapan.

Kata Kunci: Implementasi, PKH, Pengetasan Kemiskinan

1. Prof. Dr H Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar atas penyediaan sarana dan prasarananya sehingga dapat melaksanakan proses perkuliahan dengan baik.
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M.Msi selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Msi selaku wakil dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Nasrul Haq, S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan dan Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Neagara, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Budi Setiawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, arahan, motivasi serta koreksi sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua Ayahanda Andi Marsuki dan Ibunda Andi Wahidah Wati yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan serta senantiasa memberikan semangat yang tak ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam menjalani hari demi hari.
7. Buat saudaraku Andi Wahidin yang senantiasa mensupport, berdoa dsan bantuan yang tidak ternilai harganya kepada penulis.

8. Para Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan dorongan dan arahan selama penulis belajar sampai penyelesaian studi.
9. Kepada para penguji penulis mulai dari ujian proposal hingga ujian skripsi, terimakasih atas masukan serta arahnya
10. Terimakasih kepada Bapak Arif S.Pd yang berkenan untuk memberikan data-data yang berkaitan dengan PKH sehingga memudahkan penulis dalam pengerjaan skripsi.
11. Para pihak pegawai dan masyarakat Desa Latellang yang telah membantu saya dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.
12. Koordinator serta pendamping PKH atas kesediaannya untuk membantu penulis selama masa penelitian serta staf kecamatan Patimpeng yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti untuk mengurus surat-surat penelitian.
13. Terima kasih untuk Risnawati yang senantiasa menemani dalam proses pengurusan yang berkaitan dengan skripsi penulis.
14. Kepada sahabat Rahmawati, Misbah Riantari, Sri Nur Nandayani dan Hasriani Masiga. Yang selalu membantu penulis mulai dari menyusun proposal hingga sekarang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah memberi motivasi serta dorongan selama ini.
15. Seluruh teman-teman angkatan 2017 terkhusus kelas AND(H) yang selama ini senantiasa mensupport penulis.

s

16. Teman-teman KKP Plus XXI Universitas Muhammadiyah Makassar di Kabupaten Takalar Kecamatan Polongbangkeng Selatan khususnya di Desa Moncong Komba.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis memohon ridha dan magfirahnya. Semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca. Amin. Wassalam.

Makassar, 11 Juni 2021

A. Wahdaniah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Teori dan Konsep	14
C. Kerangka Pikir	28
D. Fokus penelitian	29
E. Deskripsi fokus penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Lokasi penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Informan	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik pengabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan Penelitian	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tahap Implementasi Kebijakan	22
Tabel 3. 1. Informan Penelitian.....	35
Tabel 4. 1. Keadaan Penduduk Desa Latellang	43
Tabel 4. 2. Jumlah KPM	43
Tabel 4. 3. Kategori penerima PKH.....	44
Tabel 4. 4. Verifikasi Pengolahan Data	57



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu masalah sosial yang bersifat mendunia. Sehingga kemiskinan dapat di artikan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam masalah ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia kesejahteraan bukan lagi hal yang baru karena kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menegaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah suatu institusi atau bidang yang dimana melibatkan aktivitas terorganisir yang dilakukan dengan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta guna untuk mencegah, mengatasi atau memberi kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok serta masyarakat.

Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dapat dibagi tiga, yaitu:

Pertama, faktor internal manusia, yaitu faktor yang muncul dari manusia itu sendiri, seperti; (1) lemahnya etos kerja yang terlihat dalam sikap malas, kerja tidak teratur, dan tidak bergairah. (2) kurangnya disiplin dan pengaturan waktu secara tepat. Faktor-faktor ini kemudian melemahkan tingkat produktifitas

seseorang, yang mengakibatkan rendahnya status sosial ekonominya di tengah masyarakat.

Kedua, Kemiskinan bisa terjadi disebabkan faktor non-individual seperti penyelenggara pemerintahan yang korup dan sejenisnya, yang menyalahgunakan daya dan tenaga rakyat untuk kebobrokan birokrasi yang merugikan. Kemiskinan ini juga sering dikaitkan dengan sistem ekonomi yang berorientasi kapitalis yang menguntungkan para pemilik modal saja. Sebab dalam sistem semacam ini rakyat akan banyak didominasi dan dieksploitasi.

Ketiga, visi teologi yang represif. Faktor ini terlihat berkembang luas di tengah masyarakat beragama, yaitu adanya kecenderungan sebagian umat beragama memperlakukan kemiskinan sebagai suatu yang telah menjadi suratan takdir dan kepastian yang datang dari tuhan.

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal ketrampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian) atau hidup dilokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan infrastruktur yang terbatas. Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor yaitu, faktor individual, faktor sosial, faktor kultural dan faktor struktural.

Permasalahan kemiskinan muncul karena ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang mana di ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara berkembang dan memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan sudah banyak di dukung oleh aturan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam hal ini adapun upaya yang di lakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menyalurkan bantuan PKH.

PKH merupakan salah satu *program Conditional Cash Transfer (CCT)* yang dimana telah di kenal di seluruh dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang sangat memprihatinkan sebagai bentuk penanggulangan masalah sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang di berikan kepada keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH. Selain itu sebagai bantuan program bantuan sosial bersyarat, PKH ini memberikan akses keluarga miskin yang mendapatkan bantuan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik). Sehingga PKH dapat memberikan manfaat agar dapat membantu penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita presiden RI sehingga PKH memberikan akses pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,

perawatan dan pendampungan termasuk akses terhadap sebagai program perlindungan sosial yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa:

“Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.

Dalam arti luas, perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marginal disetiap negara.

Oleh karena itu dari pengertian di tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa perlindungan sosial adalah perlindungan yang di tujukan kepada masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, keluarga dan anak-anak. Perlindungan sosial juga merupakan elemen penting dari strategi kebijakan public dalam memerangi kemiskinan serta mengurangi masalah yang di alami oleh masyarakat.

Tahun 2020 merupakan tahun dimana seluruh Negara termasuk Indonesia terkena dampak virus Corona, yang bermula dari kota Wuhan Cina. Yang dimana semakin hari semakin banyak memakan korban, sehingga wabah Covid 19 menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia

khususnya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Sehingga muncul berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat yang dimana tidak dapat di pungkiri bahwa Covid 19 hampir melumpuhkan kondisi perekonomian masyarakat.

Adapun masalah sosial dan perekonomian yang terjadi akibat adanya Covid 19 yaitu : (1) Kelangkaan barang, (2) Disorganisasi dan difungsi social, (3) Tindakan kriminal, (4) Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat, (5) Kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

Selain permasalahan di atas adapun permasalahan lain yang berkaitan dengan pandemi ini adalah masalah kesehatan. Bagi masyarakat pelosok atau pedesaan, pola hidup bersih sering kali ia abaikan dikarenakan mereka lebih fokus untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Sehingga di tengah pandemi Covid-19 perputaran ekonomi yang menurun menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Angka kemiskinan di tahun 2020 mengalami kenaikan di bandingkan pada tahun 2019. Jumlah penduduk Kabupaten Bone berdasarkan data sensus penduduk 2020 berjumlah 801.755 jiwa. Ada sedikit kenaikan angka kemiskinan di tahun 2019 persentase kemiskinan di Bone 10,06% sedangkan pada tahun 2020 mencapai 10,68% atau 81 ribu jiwa, yang mana kenaikannya mencapai 0,62%. Naiknya angka kemiskinan karena pandemi Covid-19, banyaknya sektor usaha yang sangat terdampak dimana salah satunya adalah karyawan yang di rumahkan.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Sosial, Kabupaten Bone menyalurkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat yang kurang mampu. Penyaluran kartu ini sudah dilakukan mulai hari senin, (27/10) yang berada di kecamatan Mare, Tonra, Salomekko, Kahu, Kajuara, Bontocani, Libureng dan patimpeng. Sementara pada hari selasa, (28/01) pendistribusian kartu PKH juga dilakukan di Kecamatan Awangpone, Cenrana, Ajangale, Duaboccoe, Tellusettinge. Selain itu pada hari rabu, (29/01) penyerahan kartu PKH dilanjutkan di Kecamatan Palakka, Cina, Sibulue, Barebbo dan ponre. Dan pada hari kamis dilakukan di Kecamatan Ulaweng, Lapri, Lamuru dan Bengo. Untuk hari jumaat di Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang Barat.

Permasalahan yang sering muncul dilapangan saat mengimplementasikan program yaitu ketika pihak pendamping mengarahkan juga memberi tekanan kepada KPM agar mau mengikuti prosedur ataupun aturan yang harus dituruti KPM harus mau memenuhi kewajiban dan hak sebagai peserta penerima manfaat dari program PKH, kadang-kadang masih ada sebagian masyarakat yang masih bandel dia hanya mengiyakan saja tanpa benar melaksanakan sesuai perintah serta arahan yang telah di jelaskan dari pendamping PKH, seperti anak yang malas pergi sekolah, anak yang tidak lengkap atribut sekolah itu merupakan tanggung jawab orang tua dan masih ada juga masyarakat malas keposyandu ketika waktu mengunjungi posyandu tiba. Masalah lain yang sering datang juga ketika protes-protes yang dilayangkan kepada pendamping PKH yang bahwasanya kenapa kami sebagian masyarakat tidak mendapatkan bantuan tersebut, padahal kami layak

juga untuk menerima mamfaat dari program itu. Selanjutnya ada masalah lain, kurangnya respon dari stakeholder apabila diajak kerjasama artinya tidak ada sinergisitas kerja, ketika pihak pendamping menginginkan koordinasi dari pihak stakeholder kurang tanggapan. Untuk menjawab bagaimana kondisi dan situasi di atas maka dilakukan kegiatan pemantauan melalui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat di Kecamatan Latellang, Kabupaten Bone, agar mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan serta peningkatan patisipasi 11 masyarakat dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka dalam sebuah kebijakan pemerintah.

Pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Bone berencana akan memasang tulisan di setiap rumah-rumah warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bertuliskan “Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bone. Dengan adanya program tersebut dapat memudahkan pemerintah untuk mengetahui rumah mana saja yang layak dan telah menerima bantuan tersebut. Karena tidak dapat di pungkiri bahwa penerima bantuan PKH sudah ada yang tidak layak lagi sebagai penerima bantuan lagi tetapi tetap menerima bantuan. Anggota Komisi IV DPRD Bone, Rangga Risal mengungkapkan bahwa penyaluran untuk memastikan agar bantuan PKH tepat sasaran, selain itu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bantuan tersebut dapat di manfaatkan dengan baik.

Jumlah dana yang di bagikan melalui PKH ini di sesuaikan dengan keadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Indeks dan faktor penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021 yaitu : (1) Ibu hamil dan anak usia dini 0 s.d 6 tahun sebesar Rp. 3.000.000, (2) Pendidikan anak SD sebesar Rp. 900.000, (3) Pendidikan anak SMP sebesar Rp. 1.500.000, (4) Pendidikan anak SMA sebesar Rp. 2.000.000 serta Penyandang disabilitas dan Lanjut usia sebesar Rp. 2.400.000.

Bantuan komponen di berikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Keluarga penerima manfaat PKH khusus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2019-2021 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng yaitu pada tahun 2019 jumlah yang menerima sebanyak 56 KPM, pada tahun 2020 jumlah yang menerima sebanyak 55 KPM dan pada tahun 2021 jumlah yang menerima bantuan sebanyak 61 KPM.

Program PKH dilaksanakan oleh Pendamping Sosial PKH yaitu dengan memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan melayani fasilitas peanganan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) hingga pada akhirnya Pendamping Sosial PKH harus benar-benar mampu menjadi agen perubahan sosial di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan

(PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

2. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)?
3. Bagaimana sumberdaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
4. Bagaimana disposisi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat mengetahui komunikasi dalam implementasi (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui sumberdaya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.
4. Untuk mengetahui disposisi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun pratikal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Administrasi Negara. Sekaligus sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Agar hasil penelitian ini menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Bone dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan Program Kerja Harapan (PKH).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini diantaranya adalah :

1. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengetaskan Kemiskinan Di Kota Batu

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa implementasi program keluargaharapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada dinas sosial pemerintahan kota batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi berlangsung dengan baik oleh pendamping PKH, dan peserta PKH. Dinas Sosial melibatkan Pendamping PKH dalam rapat koordinasi, seminar dan matrikasi sebagai bekal untuk meningkatkan profesional dalam implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dinas Sosial menugaskan Pendamping PKH untuk membantu peserta PKH dalam melaksanakan penyuluhan yang berhubungan dengan syarat dan ketentuan wajib yang harus dipenuhi Peserta PKH. (Sasmito, Cahyo, 2019)

Dinas Sosial Kota Batu telah menjalankan kewenangannya baik dari aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan Pendamping PKH dalam implementasi PKH untuk mengentaskan kemiskinan Peserta PKH. Agar menjadi lancar karena syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan di bidang pendidikan (peserta tetap sekolah) dan di bidang kesehatan (tetap penjaminan kesehatan jangka panjang), agar bantuan sosial melalui PKH

bias diterima secara tunai oleh Peserta PKH melalui rekening BNI masing-masing Peserta PKM. Berikutnya Pendamping PKH membantu Peserta PKH untuk mengadaptasikan bantuan, serta memberikan arahan kepada Peserta PKH untuk meningkatkan keahlian yang telah dimiliki oleh masing-masing Peserta PKH. Oleh karena itu untuk jangka panjang implementasi PKH dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan akan mampu diwujudkan oleh Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu (Sasmito, Cahyo, 2019).

2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lowokwaru lebih di fokuskan kepada masyarakat miskin khususnya pada bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun syarat penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat dari data masyarakat berdasarkan kehidupan sehari-hari. Sehingga pemerintah melakukan kerjasama dengan PT.Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan Program Kerja Harapan (PKH) Agar sesuai dengan jadwal penerimaan bantuan. Adapun upaya yang dilakukan pendamping PKH di Kecamatan Lowokwaru adalah sebagai berikut : melakukan pemutakhiran data peserta PKH secara beralas, melakukan pertemuan bulanan secara rutin dengan kelompok peserta PKH, mengadakan pertemuan pengembangan program dengan penyedia layanan. (B.S.Tlonaen, Yudid, Williy Tri Hardianto, 2014)

3. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar pencapaian implementasi Program Kerja Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Sehingga untuk memperoleh data-data dan informasi dapat menggunakan teknik dokumentasi berupa arsip ataupun foto mengenai implementasi PKH di Desa Maron, akan tetapi penggunaan teknik tersebut kurang berhasil karena minimnya kesadaran peserta PKH terhadap intisari PKH dan arti penting PKH bagi peserta PKH di Desa Maron. Walaupun demikian terdapat pula serangkaian tahapan yang berjalan dengan lancar diantaranya sumber daya yang meliputi staf, kewenangan, informasi serta fasilitas maupun kemampuan pelaksanaan (Disposisi) PKH. Di Desa Maron juga telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PKH dan para pelaksana di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar yang telah menjalankan tugas sesuai dengan *Standard Operational Procedures (SPO's)* (Antriya Eka Suwinta, 2016).

4. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Mata Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Kerja Harapan (PKH) yang mana di ketahui bahwa masalah utama yang di alami indonesia adalah tingginya jumlah kemiskinan dan pengangguran. Sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan Program Keluarga

Harapan (PKH), yang di maksud dari Program Keluarga Harapan adalah sebuah bantuan yang di tujukan kepada masyarakat agar di gunakan untuk mengakses kesehatan dan pendidikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Kecamatan Mojongsari Kabupaten Mojokerto (Purwanto et al., 2013).

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dengan adanya PKH ini dapat memberikan solusi terhadap kemiskinan yang terjadi di berbagai pelosok Negara yang memang pantas untuk menerima program tersebut . Sehingga saya tertarik mengambil judul tersebut dan meneliti secara mendalam tentang program ini di kabupaten bone khususnya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng.

B. Konsep dan Teori

a. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu.

Kata implentasi berasal dari bahasa Inggris “to Implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai suatu tujuan kegiatan secara maksimal.¹⁶ Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks

Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap implementasi menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar dapat diterapkan di lapangan, dan berhasil menghasilkan output dan hasil sesuai rencana. Untuk mencapai keluaran dan hasil tertentu, kebijakan publik perlu dilaksanakan. Jika tidak diterapkan, kebijakan tersebut hanya akan menjadi rekor elit yang ditekankan Udogi di Time (Sasmito, Cahyo, 2019).

Menurut George Edward III (Winarno, 2008), berpendapat bahwa implementasi sangat penting bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi adalah tahap kebijakan antara pembentukan rencana dan konsekuensi kebijakan dari mereka yang mempengaruhinya. Jika sebuah rencana tidak dapat mengurangi masalah sebagai tujuan kebijakan, maka rencana tersebut mungkin gagal meskipun dilaksanakan dengan baik, dan rencana yang baik mungkin gagal bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik.

Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016:126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan dalam mengambil keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut meliputi upaya untuk mengubah

keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, dan dalam konteks upaya terus menerus agar mencapai perubahan besar yang dimana harus di tentukan oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan atau di tentukan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami bahwa apa yang sebenarnya terjadi setelah rencana di nyatakan efektif atau yang di rumuskan adalah fokus implementasi kebijakan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah di setujuinya pedoman kebijakan nasional, termasuk upaya pengelolaannya dan realisasinya. Kepada pemerintah, masyarakat ataupun dampak dari peristiwa tersebut.

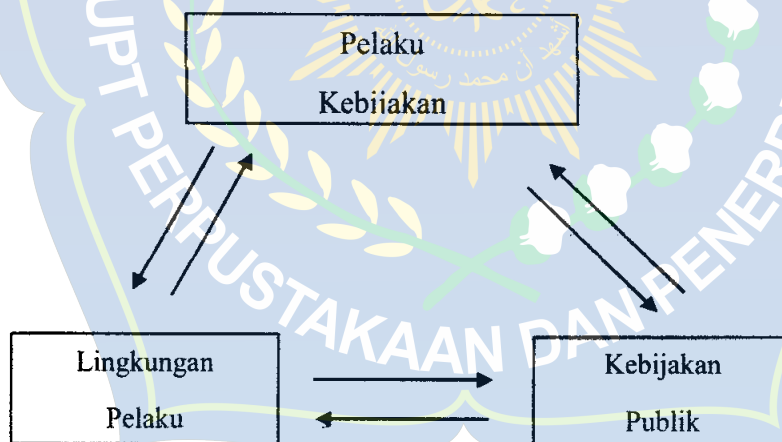
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran sasaran kebijakan itu sendiri.

Adapun implementasi yang peneliti maksud disini adalah implementasi yang dilaksanakan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

2. Model–Model Implementasi Kebijakan

Willim N. Dunn dalam (Mahmud, 2019), ada berbagai kebijakan yang ditentang oleh masyarakat karena bersifat reaktif dan masih banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kelemahan yang dimaksud yaitu inti permasalahan tidak dikenal, mengalami kelemahan karena ditentang oleh masyarakat, outcomes kebijakan tidak seperti yang diharapkan.

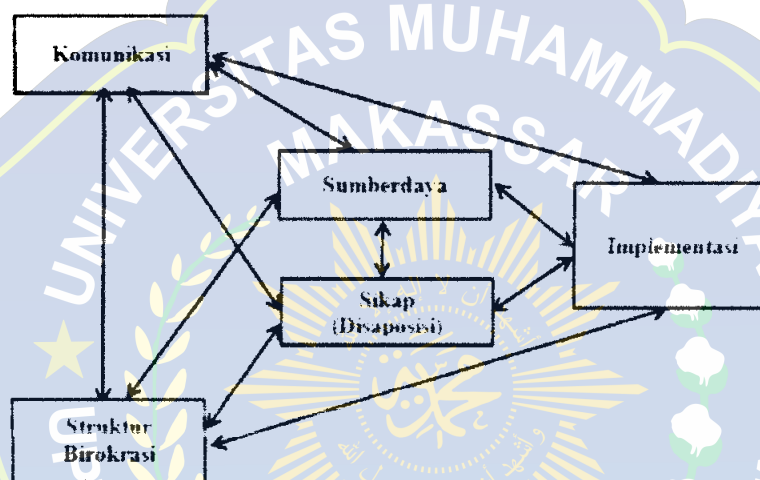
Kebijakan pada dasarnya berada dalam sistem kebijakan yang mencakup hubungan timbal balik diantara 3 unsur yaitu kebijakan public, pelaksanaan kebijakana, dan lingkungan kebijakan yang dapat di gambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 1.
Hubungan 3 Elemen Sistem Kebijakan (Model William N. Dunn)

Berbeda dengan Willim N. Dunn yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan mencakup hubungan timbal balik, lain halnya dengan Edward yang mempertimbangkan empat faktor kritis atau variable di dalam mengimplementasikan kebijakan public, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap

atau disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor internal ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Edward III melihat empat faktor penentu yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yang digambarkan dalam model implementasi sebagai berikut.



Gambar 2. 2.
Model Implementasi Kebijakan Edward III (1980)

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi menurut Edward III sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan

dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Suratman dalam (Mahmud, 2019) menjelaskan bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dana tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda (Suratman 2017).

2. Sumber Daya

Sumber daya yang memadai sangat penting dalam implementasi kebijakan, tanpa sumber daya yang memadai tentu implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang kurang memadai dapat berakibat pada pelaksanaan program tersebut. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan yang dimiliki terbatas maka harus meningkatkan skill atau kemampuan para staf. Untuk itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik.

Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam mengimplementasi kebijakan sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

3. Struktur birokrasi

Struktur Birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik

4. Disposisi

Disposisi ialah kecenderungan pelaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi

kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sedangkan Faktor-faktor yang turut juga untuk memberhasikan implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan pelaksana dan insentif.

3. Proses Implementasi Kebijakan

Yudistira dalam (Mahmud, 2019) menjelaskan bahwa Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial.

Proses tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Dalam proses persiapan terdiri dari beberapa hal penting

yaitu penyiapan sumber daya, metode, penerjemah kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan (Yudistira 2010) dalam (Mahmud, 2019).

4. Tahap-Tahap Implementasi

Tahap implementasi menurut Bernadus Luankali, dikutip dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016: 159-160), digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1.
Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

No	Tahap	Isu penting
1.	Implementasi strategi (praimplementasi)	1) Menyesuaikan struktur dengan strategi 2) 2) Melembagakan strategi 3) Mengoperasikan strategi 4) Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
2.	Pengorganisasian (organizing)	1) Desain organisasi dan struktur organisasi 2) Integrasi dan koordinasi 3) Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia 4) Hak, wewenang dan kewajiban 5) Pendelegasian (sentralisasi atau desentralisasi) 6) Pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia. 7) Budaya organisasi
3	Penggerakan kepemimpinan	1) Eektivitas kepemimpinan 2) Motivasi 3) Etika 4) Mutu 5) Team work 6) Komunikasi
4	Pengendalian	1) Desain pengendalian 2) System informasi dan manajemen

		monitoring		
		3) Pengendalian keuangan	anggaran	atau
		4) audit		

Sumber : Rahayu Kusuma Dewi (2016:159)

b. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga harapan berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun daerah.

Program Keluarga Harapan merupakan program lintas kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya yaitu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik. (Adrianto, 2017)

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

(*Kajian Program Keluarga Harapan*, 2015) Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Tujuan ini Berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH inibaik secara khusus maupun secara umum. Tujuan khusus PKH, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas kesehatan KPM
- b) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM
- c) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KPM

Tujuan umum PKH, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

3. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga. (*Kajian Program Keluarga Harapan, 2015*)

Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua—ayah, ibu—dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa

keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasikan dalam bentuk satu dapur).

PKH diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

- a) Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
- b) Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
- c) Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
- d) Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun)
- e) Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak penyandang disabilitas

Sedangkan kriteria yang terdapat di Kabupaten Bone yang di kutip dari laman Resmi Kementerian Sosial, adalah sebagai berikut :

1. Kriteria komponen kesehatan
 - a) Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan
 - b) Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal dua anak
2. Kriteria komponen pendidikan
 - a) Anak sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI) atau sederajat
 - b) Anak sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTS) atau sederajadnya
 - c) Anak sekolah menengah atas (SMA), madrasah Aliyah atau sederajadnya

d) Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial

a) Lanjut usia mulai 70 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

b) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti: Jamkesmas, BOS, Raskin dan BLT.

c. Kesejahteraan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, m

serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila (Husna, 2014).

Badrudin dalam (Muhammad Daud, 2018) mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Selain itu Abbas (2008:126) juga mengungkapkan bahwa kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang dan batinnya terpelihara, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.

Dikategorikan miskin apabila seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimnya, seperti : sandang, pangan, papan, Kesehatan, dan Pendidikan. Dimensi ekonomi dapat diukur dengan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Pra KS yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum akan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke puskesmas bila sakit.

Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m² per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga

umur 10 sampai 60 tahun buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama 3 bulan.

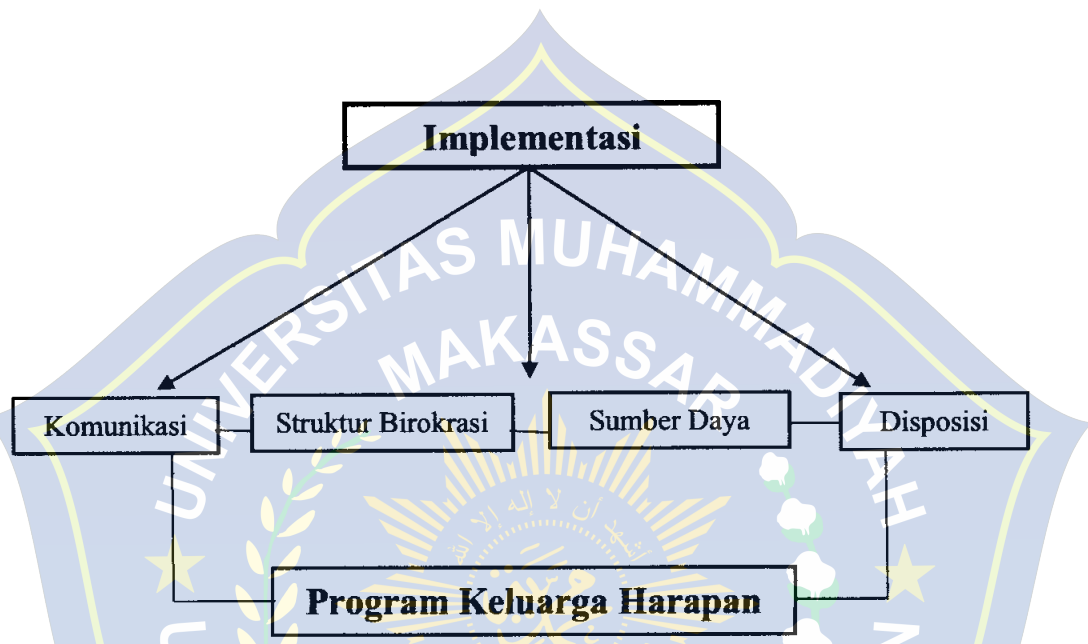
C. Kerangka Pikir

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga di anggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu masyarakat miskin dari segi ekonomi. Hal ini sangat bermanfaat, sebab dengan adanya program bantuan ini, masyarakat yang menjadi peserta PKH mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan telah dilakukan pemerintah. Dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam program-program bantuan sosial salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dikeluarkan kementerian sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dibidang

sosial. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.3
Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memfokuskan pada permasalahan Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) khususnya di Desa Latellang Kecamatan Patimpneg Kabupaten Bone.

Adapun fokus penelitian berdasarkan teori Edwar III yaitu ?

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Struktur Birokrasi
4. Disposisi

E. Deskripsi Fokus

1. Komunikasi

Adapun komunikasi yang di maksud dalam hal ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat sangatlah penting yang di mana dapat menentukan berhasil tidaknya tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Latellang. Komunikasi di perlukan agar pembuat kebijakan dan pelaksana rencana lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap rencana yang akan di terapkan pada tujuan perencanaan.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya juga memiliki peran yang sangat penting, Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu di perhatikan. Oleh karena itu sumber daya yang di maksud ialah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dimana untuk mendukung jalannya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Adapun yang di maksud dengan struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu kadang kala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat tanggung jawab antara beberapa unit pelaksana oleh karena itu di butuhkan koordinasi agar dapat mengontrol suatu implementasi.

4. Disposisi

Disposisi ialah kecenderungan pelaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan ataupun sasaran. Adapun yang di maksud dengan disposisi adalah suatu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Sehingga disposisi juga memiliki perana yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang di butuhkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dua (2) bulan yaitu sejak 26 April 2021 sampai 26 Juni 2021. Adapun lokasi atau tempat penelitian yaitu di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone tentang Implementasi Program Keluarga Harapan Era Covid 19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Serta mengetahui implementasi dan upaya apa saja yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan pandangan masyarakat. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, gagasan atau pendapat masyarakat mengenai masalah yang akan di teliti, akan tetapi penelitian ini tidak dapat di ukur dengan angka-angka. Kemudian di gunakan teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini di gunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu masalah yang akan di teliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara terstruktur. Tipe deskriptif di dasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian, kemudian menguraikan dan membandingkan kenyataan yang ada kemudian menarik kesimpulan.

C. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali di catat dan dikumpulkan oleh peneliti atau data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli tetapi referensinya masih relevan dengan kajian yang dibahas. Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang didapatkan langsung dari Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

D. Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik ini digunakan karena pemilihan informan berdasarkan tujuan dari penelitian. Informan yang dipilih dianggap dapat mewakili dan banyak mengetahui mengenai objek yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut yaitu :

- a. Dari pihak pemerintah Kecamatan Patimpeng.
- b. Kepala Desa Latellang.
- c. Sekertaris Desa Latellang.
- d. Kepala dusun Desa Latellang.
- e. Koordinator PKH Kabupaten Bone .
- f. Pendamping PKH Desa Latellang.
- g. Pemberi layanan Pendidikan yaitu kepala sekolah.
- h. Masyarakat yang menjadi sasaran PKH.

Tabel 3.1
Tabel Informan Selama Penelitian

NO	Informan	Inisial	jabatan	Jumlah
1	Andi Yunan Helmi, SE	AYN	Camat Patimpeng	1
2	Dra. Hj. Hasnawati	HS	Kepala Desa	1
3	Surahman S.Pd	SR	Sekretaris Desa	1
4	Mirza M.Kes	MR	Kepala Dusun	1
5	Arif S.Pd	AR	Koordinator PKH	1
6	Nasri S.Pd	NS	Pendamping PKH	1
7	Muliati Dahlan S.Pd	MD	Kepala Sekolah	3
8	A.najemiah, A.ratna, Rosmiaati dan Jumriah	AN, AR, RS, JM	Masyarakat	4

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang signifikan berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan atau kunjungan langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Agar dapat mengetahui dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun informasi yang dapat di peroleh dari hasil obsvasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian dan perasaan.

2. Wawancara

Teknik yang di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara. Dimana kegiatan wawancara di lakukan dengan proses tanya jawab secara langsung atau tatap muka antara penanya dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai masalah yang akan di teliti.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kumpulan dokumen yang di anggap penting dan dapat menunjang permasalahan yang akan di teliti seperti jurnal, buku, laporan, literatur majalah dan peraturan perundang-undangan. Dengan teknik ini dapat memberikan peluang kepada peneliti agar dapat memperluas wawasan mengenai masalah yang akan di teliti.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Karena tanpa pengabsahan data yang diperoleh dari lapangan akan sulit untuk di pertanggung jawabkan hasil penelitiannya. Dalam pengabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu pengecekan dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Membandingkan dengan cara mengecek ulang informasi yang didapatkan dari informan satu ke informan dua dan seterusnya, misalnya pertanyaan yang diajukan ke informan satu kemudian dipertanyakan kembali kepada informan kedua untuk membandingkan atau memperjelas kembali informasi yang

didapatkan apakah sesuai atau tidak untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat.

2) Triangulasi Teknik.

Yaitu Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang bersangkutan atau yang lain yang dapat memberikan informasi terkait dengan pertanyaan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam bentuk kategori kemudian menjabarkan kedalam unit-unit memilih mana yang penting dan sudah di pelajari serta membuat kesimpulan agar mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam menganalisis data peneliti mengacu pada beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Wawancara yang di lakukan terhadap sumber informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat terhadap studi kasus penelitian.

2. Reduksi Data

Banyaknya jumlah data yang di peroleh dari data lapangan mengharuskan peneliti untuk mencatat lebih detail dan terperinci, untuk mendapatkan data yang lebih detail memerlukan reduksi data.

3. Uji *Confirmability*

Adapun arti dari uji *confirmability* yaitu menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang telah di lakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang di lakukan maka penelitian tersebut telah masuk standar *confirmability*.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan di lakukan dengan mencari arti pola-pola penjelasan. Sehingga dilakukan dengan teliti dan cermat dengan melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan sehingga data-data yang di peroleh akurat.

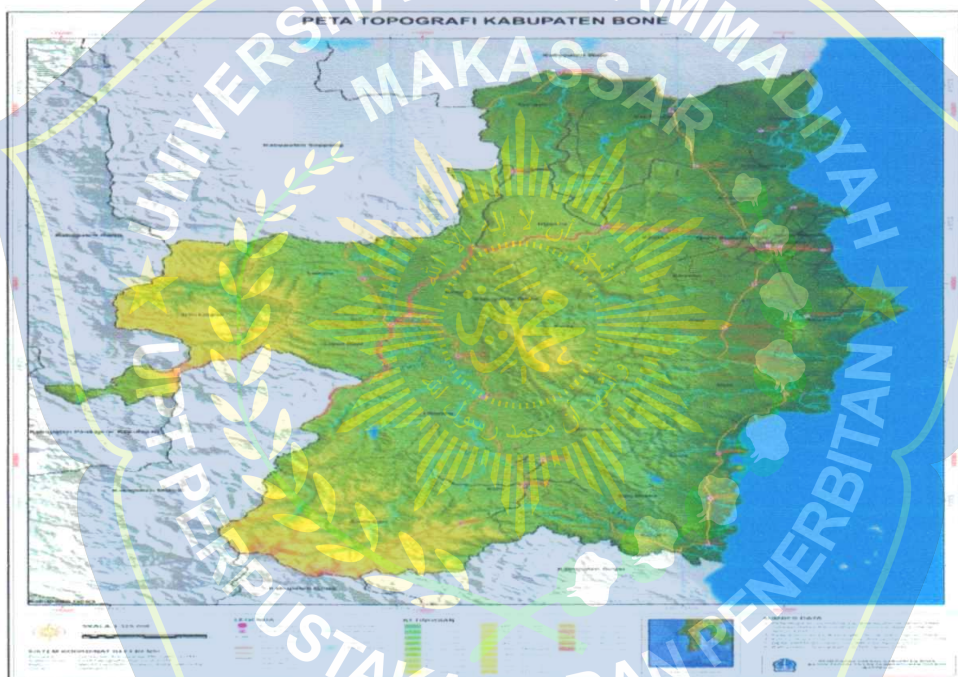
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

a) Letak Geografis



Sumber Data : Bone.GO.ID

Gambar 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bone/
Peta wilayah Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan salah satu Daerah otonomi di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watampone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.559 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 717,268 jiwa. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi yang strategis dalam

perdagangan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT.

Secara geografis, Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Wajo, Soppeng

Selatan : Kabupaten Sinjai, Gowa

Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru

Timur : Teluk Bone

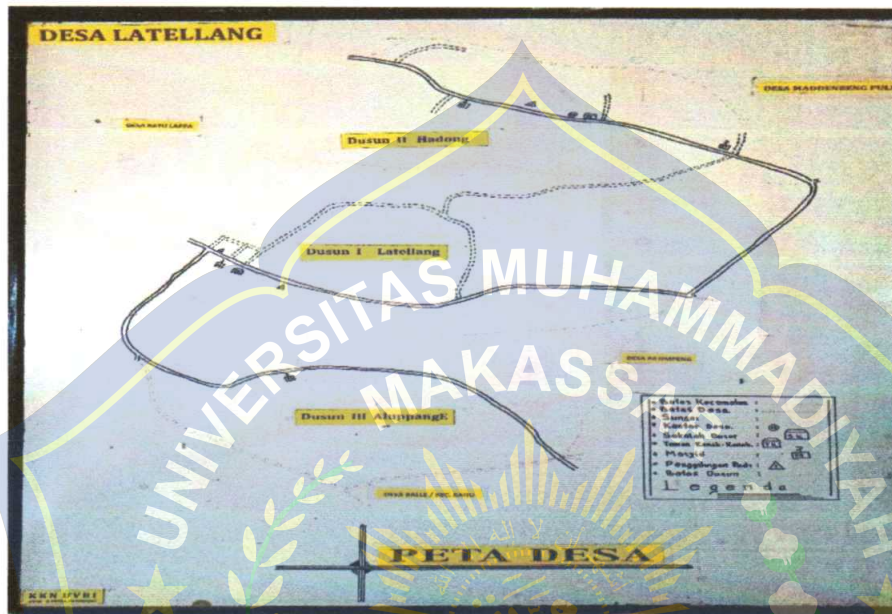
Letak kabupaten Bone dekat dengan garis khatulistiwa yang menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis sepanjang tahun 2014, kelembaban udara sekitar 77-86% dengan suhu udara 24,4°C-27,6°C.

Wilayah Kabupaten Bone tergolong dalam iklim sedang. Adapun kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur udara sekitar 26 °C – 34 °C. Kabupaten Bone terdapat pegunungan dan perbukitan yang di mana celah-celahnya terdapat aliran sungai serta di sekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam.

b) Luas Wilayah dan Kependudukan Kabupaten Bone

Luas wilayah Kabupaten Bone ialah 4.559,00 km²% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana terbagi menjadi 27 Kecamatan serta 372 desa/kelurahan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2021 adalah sebanyak 806.889 jiwa yang terdiri dari 394.477 jiwa penduduk laki-laki dan 412.412 jiwa penduduk perempuan.

2. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Latelang



Gambar 4.2

Peta Wilayah Desa Latelang

Program Keluarga Harapan (PKH) telah di laksanakan di Indonesia sejak tahun 2007, rencana tersebut merupakan produk kebijakan kementerian sosial yang bertujuan untuk mengatasi atau menanggulangi masalah kemiskinan. Adapun pada tahun pertama pelaksanaan PKH yang menjadi daerah percobaan adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gorontalo. Program Keluarga Harapan (PKH) di laksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2013, termasuk di Kabupaten Bone, dan pada tahun 2016 di Kecamatan Patimpeng tepatnya di Desa Latelang Kabupaten Bone. Adapun tugas pokok kantor kecamatan Patimpeng adalah membangun dan memajukan kehidupan masyarakat teramasu Desa Latelang.

Desa Latellang awalnya sebuah dusun Latellang dari desa Patimpeng yang dimana sekrang adalah Kecamatan Patimpeng yang dulunya merupakan wilayah Kecamatan Salomekko, Desa Latellang merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) yang berada di Kecamatan Patimpeng. Desa Latellang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Latellang, Dusun Hadong, Dusun Aluppange.

Secara topografi Desa Latellang Kecamatan Patimpeng termasuk dalam kategori daerah dataran tinggi dengan ketinggian wilayah diatas permukaan laut (DPL) 185 M dari permukaan laut. Secara geologi kecamatan patimpeng memiliki tanah berupa tanah keras, gambut, dan tanah persawahan. Potensi sumber daya air yang dimiliki cukup besar Karena banyaknya sungai yang mengalir dalam wilayah Kecamatan Patimpeng. Secara iklim mempunyai katagori daerah sub tropis yang terdiri dari 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Jumlah penduduk desa latellang pada tahun 2020 (sumber data) 1.538 jiwa. Yang dimana laki-laki 747 jiwa (49%) sedangkan perempuan 791 jiwa (51%). Seluruh penduduk Desa Latellang terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 321 kepala keluarga (KK) yang dimana rata-rata jumlah anggota keluarga sebanya 3 sampai 4 jiwa. Mata pencaharian masyarakat Desa Latellang yang dominan yaitu petani, berkebun dan sebagian kecil PNS, TNI, POLRI serta pengusaha. Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Latellang dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1.
Keadaan Penduduk Desa Latellang

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Latellang	232	228	394
Hadong	329	372	518
Aluppange	182	190	376
Jumlah	747	791	1.538

Sumber Data : Profil Desa Latellang 2020

Adapun Keluarga Penerima Manfaat di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone sebelum dan sesudah adanya Covid yaitu pada tahun 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Latellang

Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2019	56 KPM
2020	55 KPM
2021	61 KPM

Sumber data : Profil Jumlah KPM

Sehingga jumlah KPM yang terdapat di Kabupaten Bone Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone pada tahun 2021 yaitu 61 keluarga .Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Patimpeng, terdapat seorang personel dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) yaitu pendamping PKH. Kehadiran pendamping dibutuhkan guna membantu peserta PKH dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari PKH. Selain untuk kepentingan peserta, pendamping memiliki tugas pokok antara lain validasi, pertemuan bulanan dan verifikasi. Tugas pokok ini membantu

dalam mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam kurun waktu yang cepat dan tepat.

Adapun kategori yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang di mana di sesuaikan dengan keadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan indeks dan faktor penerima bantuan sosial pada tahun 2021 yaitu Ibu hamil, anak usia dini 0 s.d 6 tahun, pendidikan anak SD / sederajat, pendidikan anak SMP / sederajat, pendidikan anak SMA / sederajat, penyandang disabilitas berat (tidak dapat melakukan aktifitas tanpa bantuan orang lain), usia lanjut minimal usia 70 tahun ke atas. Seperti yang di jelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Kategori Penerima Bantuan Sosial PKH

NO	Kategori	Jumlah (Rp)
1.	Ibu Hamil/Nifas	Rp. 3.000.000,-
2.	Anak Usia Dini 0 s.d 6 Tahun	Rp. 3.000.000,-
3.	Pendidikan Anak SD/Sederajad	Rp. 900.000,-
4.	Pendidikan Anak SMP/Sederajad	Rp. 1.500.000,-
5.	Pendidikan Anak SMA/Sederajad	Rp. 2.000.000,-
6.	Penyandang disabilitas Berat (Tidak dapat melakukan aktifitas tanpa bantuan orang lain)	Rp. 2.400.000,-
7.	Lanjut Usia 70 thn	Rp. 2.400.000,-

Sumber data : Kategori penerima bantuan

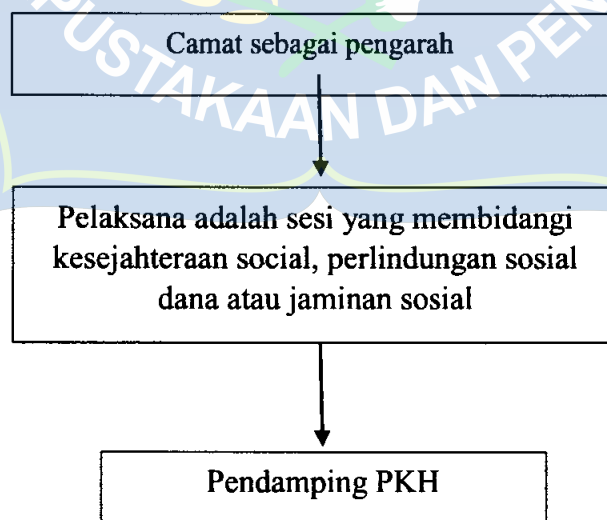
1. Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagai salah satu program pengetasan kemiskinan yang di gulirkan oleh kementerian sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan

(PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone yaitu :

- a) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM.
- b) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM.
- c) Meningkatkan status kesejahteraan dan gizi ibu hamil/nifas,serta anak di bawah usua 6 tahun dari KPM.
- d) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi masyarakat KPM .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang menjadi penentu dalam pelaksanaan PKH di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone salah satunya yaitu adanya langkah-langkah persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang di inginkan tercapai. Adapun langkah-langkah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut :



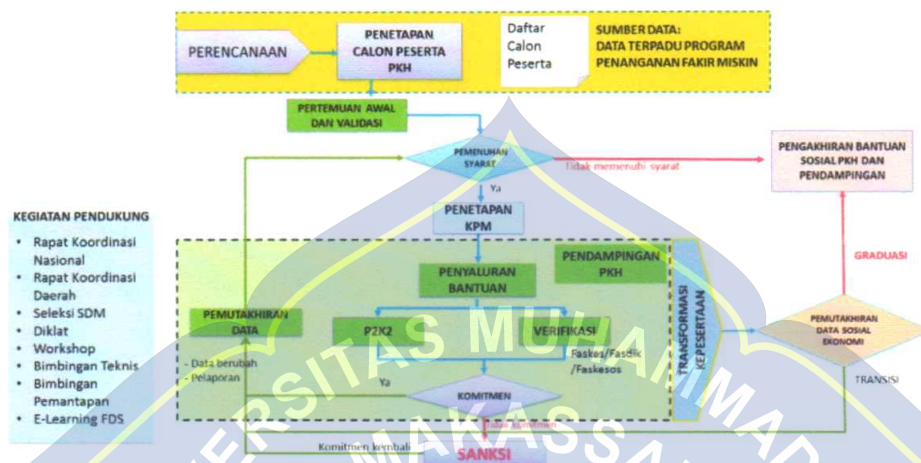
Gambar 4.3
Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memeberikan bukti nyata dalam pelaksanaan program terkait dengan pembiayaan maupun untuk mencapai tujuan. Dengan mengetahui hasil dari pelaksanaan PKH di era Covid-19 maka pendamping dapat mengetahui apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum.

Oleh karena itu Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone masih ada yang belum tepat sasaran di karenakan masih menggunakan data lama dalam menentukan penerimaan program ini oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut akan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan orientasi utama PKH dimana memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Penerima Manfaat (KPM). Sehingga di butuhkan sebuah monitoring oleh para pendamping PKH yang sangatlah penting agar dalam pelaksanaanya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dapat berjlan sesuai dengan harapan serta tujun yang ingin di capai.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai tujuan yang ditetapkan oleh kementrian sosial yaitu Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan balita serata anak yang berusia 5-7 tahun yang dimana belum masuk sekolah dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun penyesuaian dari program PKH ialah meningkatkan status kesehatan KPM. Dengan program ini keluarga yang menerima bantuan di harapkan memiliki kesehatan yang baik seperti kesehatan untuk ibu hamil, ibu nifas, anak balita serta anak yang berusia 5-7 tahun yang belum terdaftar di sekolah.

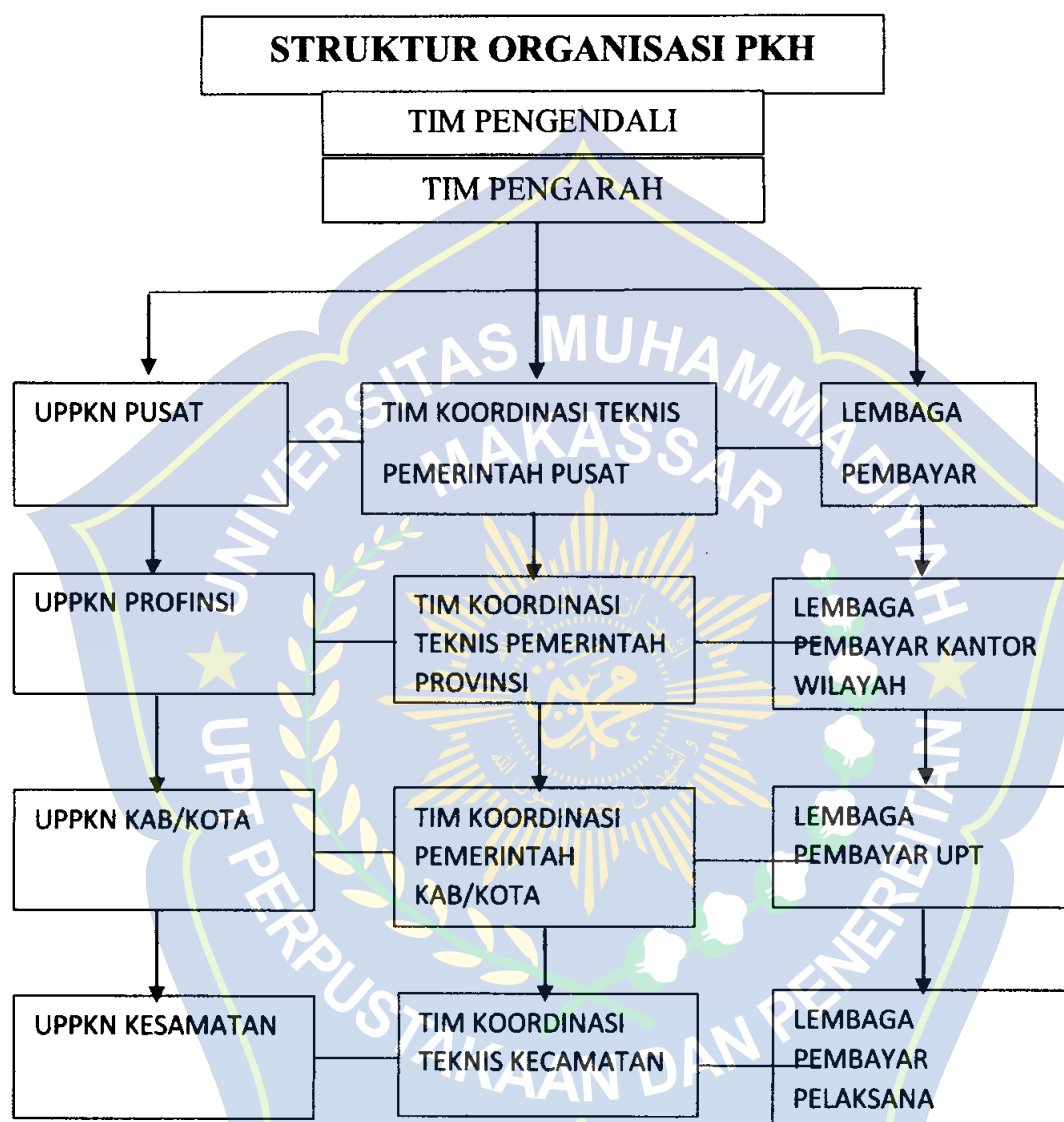
2. Alur Program Keluarga Harapan (PKH)



Gambar 4.4
Alur Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan gambar 4.2 di atas terlihat jelas alur pelaksanaan PKH, mulai dari pengumpulan data para target program, melakukan sosialisasi seperti pertemuan awal dengan para penerima manfaat dan melakukan validasi, selanjutnya pemenuhan syarat-syarat untuk menjadi penerima manfaat, setelah memenuhi semua syarat dan sudah menjadi penerima manfaat selanjutnya para penerima manfaat mendapatkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan layanan berupa pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping berupa pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan mendapatkan layanan serta verifikasi yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, setelah mendapatkan layanan para penerima manfaat harus memiliki komitmen dengan ketentuan yang sudah ada untuk para penerima manfaat dan akan mendapatkan sanksi jika para penerima manfaat melanggar ketentuan yang sudah ada, dan yang terakhir pemutakhiran data apakah ada perubahan data melalui laporan para penerima manfaat.

3. Struktur Program Keluarga Harapan (PKH)



Gambar 4.5
Struktur PKH

B. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang telah di peroleh dari lapangan selama penelitian di laksanakan. Penelitian ini di laksanakan di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Yang di mana Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Program Keluarga Harapan (PKH) berujuan agar dapat membantu masyarakat seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat kosntitusi dan Nawacita presiden RI sehingga PKH memberikan akses pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap sebagai program perlindungan sosil yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

Sehingga pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid 19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, yang di mana memfokuskan tiga indikator dari teori Edward III yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Struktur Birokrasi.

Adapun hasil penelitian yang berhubungan Implementasi Program Keluarga Harapan Era Covid 19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Adapun komunikasi yang di maksud dalam hal ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat sangatlah penting yang di mana dapat menentukan berhasil tidaknya tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Latellang. Komunikasi di perlukan agar pembuat kebijakan dan pelaksana rencana lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap rencana yang akan di terapkan pada

tujuan perencanaan. Ketika meneruskan pesan dalam suatu organisasi atau dari organisasi satu ke organisasi lain, komunikator dapat menyebarkannya dengan sengaja. Selain itu, jika sumber informasi yang berbeda memberikan penjelasan yang bertentangan, maka para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam upaya mencapai tujuan kebijakan. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh AR selaku koordinator PKH di Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa :

“Pihak-pihak yang terkait itu mulai dari kepala dinas berkoordinasi dengan unit pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten, kemudian ke pelaksana tingkat kecamatan yang membentuk penanggung jawab PKH di Kecamatan itu sendiri” (Hasil wawancara 24 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator PKH menunjukkan bahwa para petugas PKH memiliki tugas dan tujuan masing-masing yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian Dinas Sosial pada dasarnya bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini yang terpenting dalam pelaksanaan program ini adalah masyarakat dapat menyekolahkan anak-anak, dan ibu hamil serta anak-anak dapat menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai tujuan dari program ini. Namun, pada dasarnya saya melihat tidak semua orang mengetahui Program Keluarga Harapan. Pengetahuan masyarakat dengan adanya PKH ini hanya ketika masyarakat yang bersangkutan menerima program ini saja yang mengetahui akan adanya Program Keluarga Harapan (PKH)

Seperti yang di ungkapkan oleh RS salah satu penerima bantuan PKH di Kecamatan Patimpeng khususnya di Desa Latellang, beliau mengatakan bahwa :

“Saya baru akan mengetahui PKH ketika saya di beri tahu bahwa saya menerima bantuan ini, kalau sosialisasi ke masyarakat itu tidak ada” (Hasil wawancara 06 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjelaskan bahwa penyampaian informasi yang di lakukan pemerintah terkait PKH masih kurang, sehingga di perlukan adanya sosialisasi yang lebih efektif. Adapun bentuk sosialisasi yang di berikan oleh kepala Desa Latellang untuk mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti yang di ungkapkan oleh NS sebagai pedamping PKH di Desa Latellang, beliau mengatakan bahwa :

“kami menyampaikan informasi melalui pertemuan dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat di kantor kecamatan” (Hasil wawancara 24 Mei 2021)

Akan tetapi lain halnya dengan MR selaku Kepala Dusun Desa Latellang dalam wawancara beliau mengatakan bahwa :

“ komunikasi terpenting terhadap masyarakat dengan di adakannya rapat di kantor desa sehingga bantuan sosial ini berjalan dengan semestinya” (Hasil wawancara 24 Mei 2021)

Lain halnya di lingkungan sekolah, dimana saat peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepala yaitu MD selaku kepala sekolah memberikan pernyataan bahwa :

“Bantuan yang berupa PKH ini hanya di berikan kepada beberapa siswa yang dimana memang layak dan pantas menerima bantuan tersebut” (Hasil wawancara 29 Mei 2021)

Dari wawancara di atas dengan pihak sekolah penulis dapat menyimpulkan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat membantu bagi para siswa yang terdaftar sebagai penerima bantuan sehingga

dengan adanya program tersebut dapat meringankan beban para siswa penerima bantuan.

Melihat kondisi yang ada di lapangan bahwa cara penyampaian informasi yang dilakukan oleh para pihak pelaksana PKH masih sangat minim, dimana penyampaian informasi hanya melalui pertemuan oleh orang tertentu saja dimana tidak menyampaikan langsung ataupun melakukan penyuluhan kepada masyarakat ataupun memasang spanduk terkait PKH itu sendiri. Sehingga media komunikasi sederhana tersebut dapat menghambat kelancaran penyampaian informasi PKH. Dengan melihat realita seperti di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses komunikasi yang dimana belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga orientasi program ini belum terlaksana dengan baik.

2. Sumber Daya

Dalam suatu kebijakan tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, akan tetapi bukan hanya faktor tersebut yang dapat mempengaruhi dalam proses pengimplementasian suatu program. Akan tetapi faktor sumber daya juga memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dimana untuk mendukung jalannya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Indikator sumber daya memiliki beberapa elemen yakni :

a. Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya yang utama dalam upaya mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sumber daya manusia yang dimana sumber daya yang dimaksud ialah pendamping PKH, camat, serta beberapa staf yang tergolong di dalamnya. Ketidak berhasilan dalam implementasi kebijakan salah satunya di sebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak memiliki keahlian di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, akan tetapi diperlukan yang memiliki kemampuan yang sesuai di bidangnya untuk menjalankan program tersebut. Berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM). Adapun hasil wawancara mengenai Sumber Daya Manusia dengan bapak NS selaku pendamping PKH di Desa Latellang yaitu :

“kalau mengenai informasi kepada kami masih sangat minim atau terbatas untuk menjangkau alamat yang cukup susah di sebabkan jalanan yang rusak serta keterbatasan jaringan untuk berkomunikasi ataupun memberikan informasi” (Hasil wawancara 24 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendampig PKH Desa Latellang menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga dapat menghambat berjalannya program tersebut.

Selanjutnya yang berhubungan dengan mutu implementor yang di tugaskan untuk mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Patimpeng AYH selaku camat beliau mengatakan bahwa :

“Iya saya kira demikian, dalam pelaksanaan PKH yang cukup kompeten dalam bidangnya sebab pendamping PKH dalam program ini melalui tahap seleksi yang dimana di adakan langsung oleh kementerian sosial” (Hasil wawancara 31 Mei 2021)

Berhubung dengan informasi tersebut menurut temuan penulis di lapangan mengenai yang di utarakan oleh camat Patimpeng penulis menemukan adanya pendamping PKH yang belum mengerti atau memahami betul tentang makna dan penyesuaian dari PKH ini sehingga dalam penyampaian informasi kepada peserta penerima bantuan tersebut belum maksimal.

Lain halnya dengan yang di utarakan oleh AR selaku koordinator PKH Kabupaten Bone, beliau menjelaskan bahwa :

“Dengan bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia apalagi di daerah pelosok atau desa perlu kerja yang ekstra agar dapat menjangkau masyarakat yang memang benar-benar dan berhak menerima bantuan”
(Hasil wawancara 24 Mei 2021)

Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia telah terpenuhi serta memiliki kemampuan di setiap bidang masing-masing dalam menjalankan program tersebut. Akan tetapi di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

b. Sumber Daya Finansial

Yang menjadi faktor utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program adalah sumber daya finansial, yang dimana terkadang suatu program memerlukan budget yang cukup untuk menghasilkan program yang berkualitas. Berhubungan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimana hasil wawancara penulis dengan AR selaku koordinator PKH di Kabupaten Bone menjelaskan bahwa :

“ Honor yang di terima pendamping masih sangat kurang di bandingkan dengan pekerjaan yang di lapangan” (Hasil wawancara 24 Mei 2021)

Dapat dilihat dari wawancara di atas bahwa honor atau gaji yang di terima pendamping PKH tidak sesuai dengan pekerjaan yang di lakukan di lapangan. Akan tetapi lain halnya yang di utarakan oleh SR selaku sekretaris Desa Latellang diman beliau mengatakan bahwa :

“Honor yang di terima susah memadai dan memenuhi kinerja yang ada di lapangan” (Hasil wawancara 31 Mei 2021)

Berhubungan dengan dana, berdasarkan hasil survey penulis di lapangan insentif atau gaji pendamping PKH memang seharusnya perlu di tambah sebab untuk menjangkau dusun-dusun yang terdapat di Desa Latellang cukup membutuhkan perjuangan yang dimna masih terdapat jalanan yang belum teraspal dan masih terdapat jalanan bebatuan untuk sampai di lokasi.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Adapun yang di maksud dengan struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu kadang kala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat tanggung jawab antara beberapa unit pelaksana oleh karena itu di butuhkan koordinasi agar dapat mengontrol suatu implementasi.

a. SOP (Standar Operasi Prosedur)

Pelaksanaan suatu program juga membutuhkan satu prosedur yang menjadi dasar atau standar pelaksanaannya. Adapun menurut AR sebagai koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bone mengungkapkan bahwa :

“Aturan-aturan mengenai PKH yang tidak pernah di ubah selama beberapa tahun, sehingga menurut beliau PKH ini sendiri sangat membantu untuk seluruh wilayah pedalaman yang dimana sama sekali tidak memiliki kehidupan yang layak” (Hasil wawancara 24 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masih terdapat aturan yang belum di ubah hingga beberapa tahun sehingga masih menggunakan aturan yang lama dan belum di perbaharui. Selain itu berdasarkan tanggapan dari MD selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa :

“Aturan-aturan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat ketat di karenakan program ini adalah bantuan tunai terhadap siswa yang tergolong dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM)” (Hasil wawancara 29 Mei 2021)

Dari penjelasan di atas mengatakan bahwa aturan-aturan dalam PKH itu sangat ketat di karenakan bantuan ini adalah bantuan tunai sehingga perlu ketelitian dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran dan sesuai dengan syarat penerima bantuan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan AN selaku peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa :

”Saya pernah di suruh untuk pulang agar pergi mengambil kartu peserta PKH dikarenakan pada saat itu saya lupa membawa kartu PKH” (Hasil wawancara 06 Juni 2021)

Dapat di lihat dari wawancara di atas bahwa dalam proses pengambilan bantuan sangatlah ketat yang dimana harus membawa bukti atau kartu peserta

PKH. Di sisi lain ibu AR selaku peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengutarakan bahwa :

“Bantuan ini sangat membantu dari segi perekonomian akan tetapi kadang beberapa bulan nama saya tidak keluar padahal saya sudah terdaftar sebagai anggota penerima” (Hasil wawancara 06 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi, penulis melihat dimana prosedur atau aturan yang telah berlaku dengan PKH telah di ikuti serta di patuhi oleh peserta dan pengelola program ini. Adapun waktu pemutakhiran data yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 4
Verifikasi Pengelolaan Data PKH

Bulan verifikasi			Pengolahan fc	Bulan pengajuan data bayar	Bulan penyaluran
Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
PEMUTAKHIRAN DATA					
Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
PEMUTAKHIRAN DATA					
Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul
PEMUTAKHIRAN DATA					
Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt
PEMUTAKHIRAN DATA					

Sumber data : Koordinator dinas sosial Bone

Pemutakhiran data peserta PKH di lakukan setiap saat dan terus menerus sesuai dengan kondisi peserta PKH. Hasil pemutakhiran data akan berpengaruh pada jumlah nilai bantuan, eligibilitas KPM dan pelaksanaan verifikasi.

b. Fragmentasi

Dalam pelaksana suatu program, terkadang penyebaran tanggung jawab di antara beberapa unit kerja ataupun instansi. Oleh karena itu perlu adanya di butuhkan koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam

program ini. Sehingga program PKH di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone melibatkan beberapa pihak yang berhubungan di antaranya dari Pihak kecamatan, Korkab PKH, Pendamping PKH, Kepala Desa, serta Masyarakat yang di mana merupakan sasaran atau tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan wawancara dengan AYN selaku camat Patimpeng beliau mengutarakan bahwa :

“Dari pihak kecamatan Patimpeng hanya saja sebagai pengawas dalam Program Keluarga Harapan ini, apabila secara teknis di lapangan dan pendamping yang selalu terjun langsung ke masyarakat”(Hasil wawancara 31 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bawa pihak dari Kecamatan Patimpeng hanya tergolong sebagai pengawas dalam Program PKH ini adapun yang bekerja di teknis lapangan ialah pendamping yang dimana selalu terjun langsung kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan NS selaku pendamping PKH di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng beliau mengatakan bahwa :

“Apabila pelaksanaan teknis untuk Program Keluarga Harapan di kecamatan di serahkan sepenuhnya kepada kami selaku pendamping”(Hasil wawancara 24 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa keseluruhan dari teknis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sepenuhnya di kerjakan oleh pendamping PKH. Selanjutnya beliau juga menambahkan :

“tetapi yang sekarang menjadi kendala kami di lapangan yaitu kurangnya jumlah pendamping serta akses ke desa yang cukup susah atau sulit”.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat di simpulkan bawa masih terdapat beberapa kendala sehingga implentasi Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum maksimal sebagaimana yang di jelaskan oleh pendamping PKH Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Hal tersebut juga di akui oleh RS selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengatakan bahwa :

“yang menjadi penyebab yaitu kurangnya informasi kepada kami seputar PKH ini yaitu minimnya informasi yang kami dapat dari pendamping PKH, karena untuk menjangkau wilayah kami agak susah dikarenakan jalanan yang rusak serta jaringan telepon yang kurang bagu” (Hasil wawancara 06 juni 2021)

Kemudian lain halnya dengan JM selaku peserta penerima Program Keluarga Harapan beliau mengutarakan kekecewaannya terhadap bantuan PKH ini, beliau mengatakan bahwa :

“ kalau tahun lalu beliau menerima bantuan akan tetapi pada saat setelah corona beliau tidak lagi menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu beliau sangat kecewa dengan hal tersebut. Karena dengan adanya bantuan ini beban beliau sedikit berkurang akan tetapi peliaiu tidak lagi menerima bantuan tersebut”(Hasil wawancara 06 juni 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat masalah dalam koordinasi dengan peserta penerima bantuan yang di karenakan oleh kondisi jalan yang rusak serta jaringan komunikasi telepon yang kurang menunjang. Hal ini menandakan adanya penyebaran tanggung jawab oleh pihak dapat menimbulkan kendala apabila koordinasi antara pihak-pihak tersebut sulit untuk di lakukan. Begitu pula dalam implementasi PKH di Desa Latellang sangat membutuhkan partisipasi yang aktif dari seluruh pihak yang termasuk di

dalamnya baik itu masyarakat yang telah menjadi sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini.

4. Disposisi

Disposisi kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sedangkan Faktor-faktor yang turut juga untuk memberhasilkan implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Pengangkatan pelaksana

Pengangkatan pelaksana, Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat. Karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana

kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Seperti yang di utarakan oleh bapak NS selaku pendamping PKH di Desa latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone bahwa :

“Untuk perihal petugas yang menjalankan tugasnya mereka telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Walaupun saya pendamping PKH saya juga harus memperhatikan tingkah laku serta sikap, karena banya KPM yang sering kali harus di perlakukan tegas agar mau melakukan kewajiban mereka sebagai Keluarga Penerima Manfaat” (Wawancara 20 agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa petugas yang menjalankan tugasnya mereka telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Walaupun saya pendamping PKH saya juga harus memperhatikan tingkah laku serta sikap, karena banyak KPM yang sering kali harus di perlakukan tegas agar mau melakukan kewajiban mereka sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu penjelasan dari bapak AR selaku koordinator PKH di Kabupaten Bone mengutarakan bahwa:

“Pangkatan pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melalui seleksi yang di lakukan oleh kementerian sosial” (Wawancara 20 agustus 2021)

Menurut pantauan penulis di lapangan bahwa benar untuk pelaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena proses rekrutmen pegawainya melalui seleksi dari kementerian sosial. Hal ini di tandai dngan melakukannya penyeleksian agar bekerja berdasarkan keahlian serta kopetensi yang di miliki oleh pemerintan Program Keluarga Harapan (PKH)

Hal tersebut juga di akui oleh RS selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengatakan bahwa :

“Yang menjadi penyebab yaitu masi kurangnya pemahaman dari pendamping program keluarga harapan dalam menjalankan program sehingga menghambat keberlangsungan pelaksanaan program” (Hasil wawancara 20 Agustus 2021)

Kemudian lain halnya dengan JM selaku peserta penerima Program Keluarga Harapan PKH ini, beliau mengatakan bahwa :

“Sudah tepat langkah yang dilakukan oleh dinas sosial karena pengangkatan atau pemilihan pendamping langsung dilakukan oleh dinas sosial atas dasar kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki”(Hasil wawancara 20 Agustus 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa langkah yang dilakukan oleh dinas sosial karena pengangkatan atau pemilihan pendamping langsung dilakukan oleh dinas sosial atas dasar kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga kedepanya mampu menjalankan program dengan baik.

b. Insentif

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi

Kemudian lain halnya dengan JM selaku peserta penerima Program Keluarga Harapan PKH ini, beliau mengatakan bahwa :

“Perlu memang penambahan upah ataupun insentif dari apa yang di lakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar mampu bekerja ataupun menjalankan program dengan baik dan mampu melahirkan kemanfaatan kemasyarakat” (Hasil wawancara 06 juni 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa insentif memang perlu untuk di tambah karena pekerjaan pendamping di daerah memang cukup berat karena akses jalan yang cukup susah dan komunikasi yang cukup sulit sehingga pendamping PKH sering berjalan kaki untuk menjangkau desa-desa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar mampu bekerja ataupun menjalankan program dengan baik dan mampu melahirkan kemanfaatan kemasyarakat.

C. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, apabila pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Adapun hasil penelitian yang di peroleh penulis ialah menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone perlu di tingkatkan di mana penyampaian informasi masih s

angat minim seperti yang di ketahui pertemuan hanya di lakukan oleh orang tertentu saja.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Dalam suatu kebijakan mungkin tujuan yang di tetapkan sudah jelas dan logis, akan tetapi bukan hanya faktor tersebut yang dapat mempengaruhi dalam proses pengimplementasian suatu program, akan tetapi faktor sumber daya juga memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu di perhatikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa sumber daya yang terdapat di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone sudah berjalan akan tetapi masih perlu di tingkatkan. Hal ini dapat di ketahui bahwa masih terdapat pendamping PKH yang belum mengerti serta memahami betul tentang makna dan penyesuaian dari PKH.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa prosedur atau aturan yang telah berlaku dengan PKH telah di ikuti serta di patuhi oleh peserta dan pengelola program ini. Hal ini dapat di lihat dari wawancara yang

telah penulis laksanakan terhadap peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Yang di mana sudah menjadi kewajiban dari penerima bantuan tersebut.

4. Disposisi

Disposisi yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen pelaksana terhadap program. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa pengangkatan birokrat telah di laksanakan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan akan tetapi mengenai masalah insentif masih di harapkan adanya penambahan yang dimana dalam pengerjaan di lapangan memang tergolong berat sehingga perlu penambahan gaji pendamping PKH.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian tersebut yaitu bagaimana Program Keluarga Harapan itu sendiri sangat berpengaruh terhadap semua kalangan yang membutuhkan PKH itu sendiri. Oleh karena itu terdapat beberapa factor pendorong menurut Edward ialah seperti yang sudah di jelaskan di atas yaitu komunikasi, sumber daya serta Srtuktur birokrasi PKH itu sendiri. Sehingga akan di paparkan ketiga factor pendorong tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Komunikasi, sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan yang dimana komunikator dapat menyebarkan informasi dengan sengaja ataupun tidak di sengaja. Seperti yang telah di ungkapkan oleh coordinator PKH Kabupaten Bone Pak Arif, S.Pd. dimana komunikasi sebelum dan sesudah korona di Desa Latellang sangat berpengaruh karena banyaknya isu-isu yang tidak kongkrik yang biasa saja memberikan pengaruh yang tidak baik untuk peserta penerima bantuan PKH ini.
2. Sumber Daya, sumber daya juga memiliki peran yang tidak kalah penting karena, ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu di perhatikan. Oleh karena itu sumber daya yang di maksud ialah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dimana agar berjalannya implementasi Program Keluarga Harapan

(PKH) khususnya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Struktur Birokrasi, berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Adapun yang di maksud dengan struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan.
4. Disposisi, ialah sikap dan komitmen yang di miliki pelaksana terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Yang di mana akan melaksanakan proses implementasi sesuai dengan desikasi dan kemampuan di bidangnya serta pemberian insentif kepada pendamping PKH khususnya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

B. SARAN

Adapun saran agar kedepannya untuk lebih meningkatkan Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak salah sasaran serta tidak menimbulkan salah paham anra setiap individu, adalah sebagai berikut :

1. Di harapkan agar komunikasi yang terdapat di Desa Latellag Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone lebih di tingkatkan lagi yang mana penyampaian informasi harus di beri tahukan langsung ataupun melakukan pertemuan terhadap pendamping PKH dengan penerima bantuan atau biasa di sebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2. Sumber daya perlu di perkuat lagi yang dimana sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya manusia perlu di tambah agar dapat

- Wulandari, F., Yamardi, Y., & Rohayatin, T. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal caraka prabu*, 4(1), 31–46.
- Kholif, K. I., Noor, I., & Siswidiyanto. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan(Pkh)Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 709–714.
- Adrianto. (2017). *Kotribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Pada Masyarakat Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Antriya Eka Suwinta, I. P. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. *Kajian Kebijakan Publik*, 1(1), 1–11.
- B.S.Tlonaen, Yudid, Williy Tri Hardianto, C. D. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 29–37.
- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Al-Bayan*, 20(29), 45–58.
- Kajian Program Keluarga Harapan*. (2015). Direktorat Jenderal Kementrian Keuangan.
- Mahmud, F. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kabupaten Enrekang*. Uiversitas Muhammadiyah Makassar.
- Muhammad Daud, Y. M. (2018). Jurnal Humaniora. *Jurnal Humaniora*, 2(1), 29–38.
- Purwanto, S. A., Sumartono, & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana*, 16(2), 79–96.
- Sasmito, Cahyo, E. R. N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68–74.

RIWAYAT HIDUP



A. Wahdaniah atau yang lebih di kenal dengan nama Wahda lahir di Kota Baru, pada tanggal 28 Februari 1999. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Andi Marsuki dan Andi Wahidah Wati. Peneliti mulai bersekolah di jenjang sekolah dasar yaitu SD INPRES 3/77 PATIMPENG dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMPN 1 PATIMPENG dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 PATIMPENG yang dimana saat ini menjadi SMAN 19 BONE pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Karena memiliki kemauan yang kuat dalam hal pendidikan maka peneliti melanjutkan ke jenjang pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM), dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara (IAN), dengan nomor stanbuk 105611129717 dan di kampus ini juga penulis mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.Sos).